

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 351-357  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11473039)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11473039>

## Analisis Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Era Reformasi

Mahindah<sup>1</sup>, Farur Rosi<sup>2</sup>, Muhammad Yasin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [mahindah3@gmail.com](mailto:mahindah3@gmail.com)<sup>1</sup>, [priasejati2003@gmail.com](mailto:priasejati2003@gmail.com)<sup>2</sup>, [yasin@untag-sby.ac.id](mailto:yasin@untag-sby.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

Sejarah ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1945 hingga pemerintahan transisi pasca-Orde Baru. Pada awalnya, perekonomian Indonesia mengalami kesulitan dengan pertumbuhan yang fluktuatif, defisit saldo neraca pembayaran, dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus membesar. Pemerintahan Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966, mencoba mengatasi masalah tersebut dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, kebijakan ekonomi Orde Baru meninggalkan beberapa masalah seperti ketergantungan pada modal asing. Pemerintahan transisi muncul pada tahun 1998 setelah krisis ekonomi dan krisis politik yang diawali dengan kerusuhan di Jakarta. Pemerintahan ini awalnya diharapkan sebagai era reformasi, tetapi kemudian dianggap tidak memberikan perubahan yang signifikan. Rumusan masalah yang diajukan mencakup pengertian utang luar negeri, jumlah utang dari era Soeharto hingga Jokowi, hubungan antara posisi utang dan pertumbuhan ekonomi, dampak krisis keuangan global pada posisi utang Indonesia, dan cara pemerintah membayar utang luar negeri. Tujuan penelitian melibatkan pemahaman terhadap konsep utang luar negeri, perbandingan jumlah utang dari presiden Soeharto hingga Jokowi, analisis hubungan antara posisi utang dan pertumbuhan ekonomi, evaluasi dampak krisis keuangan global terhadap utang Indonesia, serta pemahaman metode pembayaran utang oleh pemerintah.

Kata Kunci: *Utang Luar Negeri, Indonesia*

### Abstract

*Indonesian economic history after independence in 1945 to the post-New Order transitional government. Initially, the Indonesian economy experienced difficulties with fluctuating growth, a balance of payments deficit, and a State Revenue and Expenditure Budget (APBN) deficit that continued to grow. The New Order government, which began in 1966, tried to overcome these problems by focusing on economic and social development. Even though it succeeded in achieving high economic growth, the New Order's economic policies left behind several problems such as dependence on foreign capital. A transitional government emerged in 1998 after an economic and political crisis that began with riots in Jakarta. This government was initially expected to be an era of reform, but was later deemed not to provide significant changes. The proposed problem formulation includes the definition of foreign debt, the amount of debt from the Soeharto to Jokowi era, the relationship between the debt position and economic growth, the impact of the global financial crisis on the debt position Indonesia, and how the government pays foreign debt. The research objectives involve understanding the concept of foreign debt, comparing the amount of debt from presidents Soeharto to Jokowi, analyzing the relationship between debt position and economic growth, evaluating the impact of the global financial crisis on Indonesia's debt, as well as understanding debt repayment methods by the government.*

**Keywords:** *Foreign Debt, Indonesia*

---

#### Article Info

Received date: 23 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 03 June 2024

### PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti dalam praktiknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan DISA memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Akibatnya, selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk: walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata per tahun hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965–1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958, dari

tahun ke tahun defisit saldo neraca pembayaran (BOP) dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membesar.

Tepatnya sejak bulan Maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat, dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB, dan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF (Tambunan, 2006). Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor, yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negaranegara Barat. Menjelang akhir tahun 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter- Government Group on Indonesia (IGGI) dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia (Tambunan, 2006). Akan tetapi, hal-hal positif yang dibicarakan di atas tersebut tidak mengatakan bahwa pemerintahan Orde Baru tanpa cacat. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi tinggi, dan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal terakhir ini dapat dilihat antara lain pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan tahun 1997 (Tambunan, 2006b).

Pada tanggal 14 dan tanggal 15 Mei 1997 nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS, mengalami suatu guncangan hebat akibat para investor asing yang mengambil keputusan "jual". Mereka mengambil sikap demikian, karena tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Untuk mempertahankan nilai tukar bath agar tidak jatuh terus, pemerintah Thailand melakukan intervensi dan didukung oleh intervensi yang dilakukan oleh bank sentral Singapura. Akan tetapi, pada hari Rabu 2 Juli 1997, bank sentral Thailand terpaksa mengumumkan, bahwa nilai tukar baht dibebaskan dari ikatan dolar AS. Sejak itu nasibnya diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Hari itu juga pemerintah Thailand meminta bantuan IMF. Pengumuman itu mendepresiasi nilai bath sekitar 15-20 persen hingga mencapai nilai terendah, yaitu 28,20 bath per dolar AS. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan 14 beberapa negara Asia lainnya, hal itu merupakan awal dari krisis keuangan di Asia. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang sekitar bulan Juli 1997, dari Rp 2.500 menjadi Rp. 2.650 per dolar AS. pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret di antaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 trilyun dalam upaya mengimbangi keterbatasan wa anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut.

Pada awalnya pemerintah berusaha untuk menangani masalah krisis rupiah ini dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dibendung lagi dengan kekuatan sendiri, lebih lagi karena cadangan dolar AS di BI sudah mulai menipis karena terus digunakan untuk intervensi dan menahan atau mendongkrak kembali nilai tukar rupiah, pada 8 Oktober 1997 pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF. Paket program pemulihan ekonomi yang disyaratkan IMF pertama kali diluncurkan pada bulan November 1997, bersama pinjaman angsu- ran pertama senilai 3 miliar dolar AS. Pertama diharapkan bahwa dengan disetujuinya paket tersebut oleh pemerintah Indonesia, nilai rupiah akan menguat dan stabil kembali. Akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa nilai rupiah terus melemah sampai pernah mencapai Rp 15.000 per dolar AS. Kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang pada waktu itu terus merosot, membuat kesepakatan itu harus ditegaskan dalam nota kesepakatan (Letter of Intent/Lol) ditandatangani bersama antara pemerintah Indonesia dan IMF pada bulan anuari 1998.

Nota kesepakatan itu terdiri atas 50 butir kebijaksanaankebijaksanaan yang mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan structural (Tambunan, 2006b).

esia sejak merdeka tahun 1945. Krisis politik tersebut diawali dengan penembakan oleh tentara terhadap empat mahasiswa Universitas Trisakti, tepatnya tanggal 13 Mei 1998, yang dikenal dengan sebutan Tragedi Trisakti. Kemudian, pada tanggal 14 dan 15 Mei kota Jakarta dilanda suatu kerusuhan yang juga dapat dikatakan paling besar dan paling sadis yang pernah dialami Indonesia. Setelah kedua peristiwa tersebut, gerakan mahasiswa yang sebelumnya sudah berlangsung semakin gencar. Menjelang minggu-minggu terakhir bulan Mei 1998, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dikuasai/diduduki oleh ribuan mahasiswa/ siswi dari puluhan perguruan tinggi dari Jakarta dan luar Jakarta.

Puncak dari keberhasilan comban mahasiswa tersebut, di satu pihak, dan dari krisis politik di pihak lain, adalah pada tanggal 21 Mei 1998, yaitu Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya BL Habibie. Tanggal 23 Mei 1998 Presiden Habibie membentuk kabinet baru, awal dari terbentuknya pemerintahan transisi. Pada awalnya pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Akan tetapi setelah setahun berlalu, masyarakat mulai melihat bahwa sebenarnya pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, mereka juga orang-orang rezim Orde Baru, dan tidak ada perubahan-perubahan yang nyata. Bahkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semakin menjadi-jadi, kerusuhan muncul di mana-mana, dan masalah Soeharto tidak terselesaikan. Akhirnya, banyak kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya pemerintahan transisi dari pada pemerintahan reformasi (Tambunan, 2006b).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Utang Luar negeri

Menurut Bank Dunia, utang luar negeri adalah kewajiban finansial yang timbul ketika suatu pemerintah atau badan usaha mengambil pinjaman dari luar negeri. Utang ini bisa berupa pinjaman, obligasi, atau kredit dengan bunga yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. IMF mendefinisikan utang luar negeri sebagai kewajiban yang timbul dari penerimaan sumber daya dari luar negeri, yang harus dibayar kembali dengan imbalan dalam bentuk pembayaran bunga atau angsuran pokok. Utang ini dapat melibatkan pemerintah, badan usaha, atau sektor swasta. Dalam buku "International Economics: Theory and Policy," Krugman mendeskripsikan utang luar negeri sebagai kewajiban finansial yang harus dilunasi oleh suatu negara kepada kreditur asing. Mereka mencatat bahwa utang ini dapat memiliki dampak ekonomi dan keuangan yang signifikan tergantung pada ukuran, jenis, dan manajemennya.

### Jumlah utang luar negeri presiden Soeharto ke presiden Jokowi

Menurut data, utang di masa pemerintahan Soeharto berada di kisaran Rp 551,4 triliun. Sementara PDB saat itu di kisaran Rp 955,6 triliun. Bedanya, Soeharto tidak memilih utang dari negara blok timur, tapi cenderung ke blok barat dan lembaga asing semisal Bank Dunia dan IMF. Warisan utang dari Hindia Belanda yang sempat dibatalkan oleh Soekarno, justru di re-schedule ulang oleh Soeharto pada 1964. Selain mereschedule ulang, Soeharto juga mendapat komitmen pinjaman baru. Utang di era Soeharto, disebutkan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pabrik, industri, dan lain-lain.

Setelah Soeharto dilengserkan pada tahun 1998, warisan utang negara itupun diberikan kepada Presiden BJ Habibie. Proses akumulasi utang pun terus berlanjut di era Presiden Habibie. Bahkan, Habibie tercatat sebagai presiden yang membuat utang Indonesia makin besar hanya dalam waktu singkat. Saat itu, rasio utang terhadap PDB berada di level 85,4 persen. Sehingga utang di era Habibie sekitar Rp 938,8 triliun, sementara PDB Rp 1.099 triliun.

Di era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Indonesia sempat menurunkan utang menjadi 77,2 persen. Saat itu utang pemerintah sebesar Rp 1.271 triliun dan PDB Rp 1.491 triliun.

Di bawah kepemimpinan presiden Megawati, rasio utang Indonesia kembali mengalami penurunan. Utang pada era Megawati sebesar Rp 1.298 triliun, sementara PDB Rp 2.303 triliun. Sehingga rasio utang saat itu 56,5 persen terhadap PDB.

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Setelah mendapat warisan utang sebesar RP 1.298 triliun, utang Indonesia justru semakin membengkak menjadi Rp 2.608 triliun. Namun, SBY sempat melunasi utang-utangnya pada dana moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang telah menjerat sejak tahun 1997. Pada Oktober 2006, sisa utang pada IMF sebesar USD 3,7 miliar yang harusnya jatuh tempo pada 2010 telah diselesaikan oleh BI.

Kementerian Keuangan RI mencatat, sampai akhir Desember 2020 total utang pemerintah mencapai angka Rp6.074,56 triliun sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen. Secara nominal, utang pemerintah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini disebabkan, pelemahan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia naik lebih dari dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Posisi utang Indonesia kemudian menanjak menjadi USD 307,75 miliar pada 2015, USD 318,94 miliar pada 2016, USD 353,56 miliar pada 2017, USD 379,59 miliar pada 2018, dan USD 402,08 miliar atau sekitar Rp5.634 Triliun. Utang luar negeri Indonesia paling banyak berasal dari Singapura yang mencapai USD 67,93 miliar, disusul oleh Jepang sebesar USD 29,03 miliar dan Tiongkok USD 20,03 miliar. Selain ketiga negara itu, Indonesia juga memiliki pinjaman dari Amerika, Australia, Austria, Hongkong, Korea Selatan, Inggris, Swiss, dan berbagai negara lainnya.

### **Hubungan antara posisi utang dan pertumbuhan ekonomi**

Dalam menciptakan kesinambungan ekonomi seringkali terkendala pada pendapatan yang selalu lebih kecil dibandingkan pengeluaran yang diharapkan terus meningkat. Kesenjangan anggaran tersebut kemudian menghadirkan modal eksternal agar dapat menggunakan serta mengkombinasikan faktor produksi sehingga dapat meningkatkan penawaran agregat. Pengujian yang telah dilakukan diperoleh ketidaksesuaian dengan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan utang luar negeri berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya penjelasan Solow dalam Jhingan (2014:274) terkait peningkatan pendapatan melalui modal yang dialokasikan untuk meningkatkan penawaran agregat adalah ditolak. Samuelson dan Nordhaus (1992:355) menjelaskan utang luar negeri (ULN) dalam jangka panjang menghambat akselerasi pembangunan serta mengakibatkan kontraksi ekonomi. Hal ini disebabkan karena beban fiskal berupa kewajiban dan pokok bunga yang harus dibayar pada masa depan. Namun dengan dasar melihat rasio ULN terhadap PDB periode 2010-2017 menunjukkan <37%, dapat dikatakan bahwa rasio tersebut belum memenuhi kriteria pemerintah terkait pinjaman yang akan membebani pendapatan nasional, karena belum mendekati 60%. Pembangunan ekonomi melalui investasi social dengan biaya tinggi memerlukan waktu dalam menuai hasil berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan. Hal ini dikemukakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "FAQ Utang Pemerintah", dengan pertanyaan bahwa kenapa hasil belanja produktif belum dirasakan (<https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang>). Berdasarkan penjelasan tersebut serta relevansinya dengan permasalahan penelitian, pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan disebabkan sejumlah biaya yang harus dialokasikan dengan nominal dikatakan tidak cukup kecil. Eksternalitas positif dapat diperoleh setelah fisik barang publik terealisasi berdasarkan tahapan waktu penyelesaian yang ditetapkan. Selain karena waktu yang diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi, berdasarkan penjelasan BI melalui publikasi statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI), posisi utang luar negeri pemerintah periode 2010-2017 menurut proyek ditujukan untuk kegiatan pembangunan dan umumnya ditarik melalui bentuk barang. Menurut asumsi penulis apabila pinjaman ditarik melalui barang akan mengurangi kontribusi sektor primer serta sekunder dalam menciptakan kesinambungan ekonomi. Berbagai macam lapangan usaha yang terdapat didalamnya, terkait dengan penyediaan bahan mentah serta proses menambah nilai barang dan jasa, secara kuantitas jelas akan mengalami penurunan. Hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad dan Utomo (2005), Malik, Hayat dan Hayat (2010), Safdari dan Menhrizi (2011).

### **Dampak krisis keuangan global pada posisi utang Indonesia**

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) ternyata telah mempengaruhi wajah keuangan global. Negara-negara di wilayah Eropa seperti Islandia, Rusia, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, demikian juga dengan di wilayah Asia-Pasifik, seperti Cina, Taiwan, Singapura, Philipina, Jepang, dan Australia terkena dampak krisis. Dampak krisis yang dihadapi negara-negara tersebut pada umum adalah meningkatnya inflasi, turunnya nilai tukar, turunnya pertumbuhan ekonomi, runtuhnya indeks bursa dan sejumlah bank/institusi keuangan/korporasi mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut. Dampak langsung krisis keuangan ini bagi Indonesia adalah kerugian beberapa perusahaan di Indonesia yang berinvestasi di institusi-institusi keuangan Amerika Serikat. Perusahaan keuangan ataupun non bank yang mengalokasikan dana pada sumber pendapatan alternatif, melalui pembelian saham atau obligasi pada instrumen keuangan asing, seperti Citigroup, UBS, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac, American International Group (AIG) dan lainnya. Sedangkan dampak tidak langsung dari krisis adalah turunnya

likuiditas, melonjaknya tingkat suku bunga, turunnya harga komoditas, melemahnya nilai tukar rupiah, dan melemahnya pertumbuhan sumber dana. Demikian juga, menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor, dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang menyebabkan melemahnya pasar modal.

Krisis keuangan juga mengurangi pasokan likuiditas sektor keuangan karena bangkrutnya beberapa institusi keuangan global khususnya bank-bank investasi yang berpengaruh pada aliran kas perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keadaan ini akan menyebabkan naiknya tingkat suku bunga dan turunnya pendanaan ke pasar modal dan perbankan global. Sesungguhnya turunnya nilai rupiah ini bisa meningkatkan nilai ekspor, namun krisis keuangan menyebabkan turunnya permintaan komoditas dari luar negeri. Turunnya ekspor mengurangi pendapatan negara sehingga jika tidak diimbangi dengan turunnya pengeluaran dollar melalui penurunan tingkat impor akan menyebabkan defisit perdagangan. Defisit perdagangan mempersulit modal masuk seiring dengan keringnya likuiditas pasar keuangan global. Selain itu, kenaikan impor di saat pasar ekspor stagnan akan menekan kenaikan cadangan devisa dan berarti akan memunculkan ekspektasi gejolak depresiasi rupiah. Juga, kemerosotan akan mengacaukan dan menurunkan produksi dalam negeri yang juga berakibat pengurangan pekerja atau peningkatan pengangguran. Untuk mengatasi dampak krisis ini, BI menempuh beberapa langkah, yaitu memperkuat likuiditas sektor perbankan, menjaga pertumbuhan kredit pada tingkat yang sesuai untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan terkait neraca pembayaran. Kebijakan yang dijalankan adalah memperkuat sektor perbankan untuk mengantisipasi dampak pengeringan likuiditas global, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diupayakan pertumbuhan kredit dijaga pada level yang tetap, dan mencari pembiayaan untuk mengurangi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dari sumber non pasar, seperti sumber-sumber bilateral maupun multilateral.<sup>2</sup>

### **Utang Luar Negeri**

Menurut Bank Indonesia, utang luar negeri didefinisikan sebagai utang utang penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). Konsep dan terminologi utang luar negeri mengacu pada IMF's *External Debt Statistics: Guide for compilers and Users* (2003):

Berdasarkan definisi di atas, ULN merupakan utang yang diterima oleh penduduk dari bukan penduduk baik yang pembayaran ULN nya mensyaratkan pembayaran pokok dan/ atau bunga pada masa mendatang. Dengan demikian ULN harus melibatkan penduduk dengan bukan penduduk dengan utang dalam bentuk mata uang asing maupun mata uang negara peminjam. Negara yang tidak mempunyai tabungan dalam negeri yang cukup untuk membiayai pertumbuhan ekonomi umumnya menutup kesenjangan pembiayaan dengan mencari sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri. Akhirnya yang terjadi adalah mengalirnya arus modal dari negara industri ke NSB. Karena sifatnya, arus modal asing yang harus dibayar kembali juga disebut tabungan luar negeri. Tabungan luar negeri meliputi tabungan resmi ke sektor pemerintah (*official saving*) dan tabungan swasta (*private saving*) (Kuncoro, 2006:264). Sebagian besar tabungan resmi berwujud konsesional, artinya dapat berupa hibah (*grants*) atau pinjaman lunak (*soft loans*), yang biasanya berbunga rendah dengan jangka waktu pengembalian yang lebih lama. Aliran konsesional ini secara teknis disebut bantuan pembangunan resmi (*ODA, Official Development Assistance*), namun lebih populer disebut bantuan luar negeri (*foreign aid*).

Karena bantuan luar negeri banyak yang harus dibayar kembali maka umumnya disebut juga utang luar negeri. World Bank (1992) mengklasifikasikan total utang luar negeri menjadi tiga jenis yaitu utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan penggunaan kredit IMF (lihat Gambar 2). Utang jangka pendek adalah utang dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang. Utang jangka panjang umumnya berjangka waktu lebih dari satu tahun. Penggunaan kredit IMF (International Monetary Fund) merupakan kewajiban yang dapat dibeli kembali (*repurchase obligations*) atas semua penggunaan fasilitas IMF. Utang yang berjangka panjang dapat diperinci menurut jenis utangnya, yaitu: utang swasta yang tidak dijamin oleh pemerintah (*private nonguaranteed debt*), dan utang pemerintah dan utang yang dijamin oleh pemerintah (*public and publicity guaranteed debt*). Utang swasta yang *nonguaranteed debt* adalah utang yang dilakukan oleh debitur swasta, di mana utang tersebut tidak dijamin oleh institusi pemerintah. Di lain pihak, utang pemerintah adalah utang yang dilakukan oleh suatu institusi pemerintah, termasuk pemerintah pusat, departemen, dan lembaga

pemerintah yang otonom. Utang yang *publicity guaranteed* merupakan utang yang dilakukan swasta namun dijamin pembayarannya oleh suatu lembaga

pemerintah. Bagi kebanyakan NSB, jenis utang yang *public and publicity guaranteed* yang perlu lebih mendapat perhatian karena apabila NSB tidak mampu membayar kembali utang tersebut maka pemerintah negara tersebutlah yang menanggung akibatnya. Risiko ini tidak dijumpai untuk kategori utang swasta yang tidak dijamin oleh pemerintah karena swastalah yang harus menanggung akibatnya. Utang yang tergolong *public and publicity guaranteed* dapat diklasifikasikan menurut krediturnya. Selama ini kreditur dapat berasal dari sumber resmi maupun swasta. Utang luar negeri yang berasal dari sumber resmi dibagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, pinjaman bilateral, yaitu pinjaman antarpemerintah dan lembaga pemerintah (termasuk bank sentral), misalnya bantuan pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia. Kedua, pinjaman multilateral, yaitu pinjaman dan kredit dari lembaga keuangan internasional seperti PBB, Bank Dunia, IGGI, bank-bank pembangunan regional, yang diberikan/dipinjamkan kepada NSB. Utang luar negeri yang berasal dari kreditur swasta bisa pula berwujud pinjaman dari bank-bank komersial, obligasi, dan lain-lain. Pinjaman dari bank-bank komersial adalah pinjaman dari bank-bank swasta dan lembaga keuangan swasta lainnya. Obligasi dikeluarkan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Bentuk lain adalah kredit dari perusahaan manufaktur, eksportir, dan pemasok barang lainnya, serta kredit bank yang ditutup dengan jaminan lembaga kredit ekspor.

## SIMPULAN

Sejarah ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1945 hingga pemerintahan transisi pasca-Orde Baru. Pada awalnya, perekonomian Indonesia mengalami kesulitan dengan pertumbuhan yang fluktuatif, defisit saldo neraca pembayaran, dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus membesar. Pemerintahan Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966, mencoba mengatasi masalah tersebut dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, kebijakan ekonomi Orde Baru meninggalkan beberapa masalah seperti ketergantungan pada modal asing. Pemerintahan transisi muncul pada tahun 1998 setelah krisis ekonomi dan krisis politik yang diawali dengan kerusuhan di Jakarta. Pemerintahan ini awalnya diharapkan sebagai era reformasi, tetapi kemudian dianggap tidak memberikan perubahan yang signifikan.

Rumusan masalah yang diajukan pada bab ini mencakup pengertian utang luar negeri, jumlah utang dari era Soeharto hingga Jokowi, hubungan antara posisi utang dan pertumbuhan ekonomi, dampak krisis keuangan global pada posisi utang Indonesia, dan cara pemerintah membayar utang luar negeri. Tujuan penelitian melibatkan pemahaman terhadap konsep utang luar negeri, perbandingan jumlah utang dari presiden Soeharto hingga Jokowi, analisis hubungan antara posisi utang dan pertumbuhan ekonomi, evaluasi dampak krisis keuangan global terhadap utang Indonesia, serta pemahaman metode pembayaran utang oleh pemerintah.

Selanjutnya, penulis membahas definisi utang luar negeri menurut beberapa sumber seperti Bank Dunia, IMF, dan Paul Krugman. Selain itu, bab ini menguraikan jumlah utang luar negeri dari masa pemerintahan Soeharto hingga Jokowi, menyoroti hubungan antara posisi utang dan pertumbuhan ekonomi, serta menganalisis dampak krisis keuangan global pada posisi utang Indonesia. Terakhir, bab ini membahas cara pemerintah membayar utang luar negeri, termasuk strategi menggunakan instrumen utang, debt swap, pajak, Surat Berharga Negara (SBN), dan hasil ekspor.

## SARAN

angunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan juga menimbulkan dampak negatif, seperti ketergantungan pada modal asing dan masalah fundamental ekonomi yang rapuh.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menjadi puncak dari kelemahan sistem ekonomi yang terbangun selama masa Orde Baru. Krisis tersebut mencakup krisis nilai tukar rupiah, krisis perbankan, dan krisis ekonomi secara menyeluruh. Pemerintahan transisi yang diawali dengan pemerintahan Habibie hingga pemerintahan Megawati memiliki tantangan besar dalam menangani dampak krisis dan melakukan reformasi ekonomi.

Dalam konteks utang luar negeri, pemerintahan Soeharto hingga Jokowi mengalami perubahan jumlah utang yang signifikan. Era Soeharto dikenal dengan pengelolaan utang yang cenderung mengarah pada pembangunan infrastruktur dan industri. Namun, hal ini juga membawa dampak negatif terkait ketergantungan pada sumber daya luar negeri. Pemerintahan pascareformasi, terutama pada era Jokowi, harus mengelola utang dengan cermat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **REFERENSI**

- Darmawan, I. (, 1-2 Februari 2000). *Antara Hutang dan Utang*. Harian.
- Darmawan, I. (1999). "Penghentian Pinjaman dari IMF, Harian Suara Karya.
- Darmawan, I. (1999). Harian Bernas. *Dampak Penghentian Bantuan IMF*, Dimuat tanggal 30 DESEMBER.
- Indonesia, B. (2014). . *Laporan Perekonomian Indonesia*.
- Indonesia, B. I. (2015). *Statistik Utang Luar*, Edisi Desember.
- Todaro, M. P. (2003). Edisi kedelapan. Jakarta. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid*, : Erlangga.